

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini permasalahan ekonomi di Indonesia semakin kompleks. Kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Juli 2019), jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25,1 juta jiwa dengan peesentase 9,41%. Banyak hal yang menyebabkan kemiskinan berada pada angka itu, salah satunya adalah kurangnya keterampilan atau kemampuan sumber daya manusia, kurangnya modal yang tentu akan menghambat usaha mereka dan lain sebagainya. Banyak pihak yang berusaha memecahkan permasalahan kemiskinan termasuk pemerintah. Namun kita perlu mengetahui bahwa pemerintahpun juga belum dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, walaupun setiap pemimpin di Indonesia selalu mengatakan kemiskinan sebagai misi pertama yang harus diatasi.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan perhatian dan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Karena ketika kemiskinan hanya disentuh dan berusaha diselesaikan oleh segelintir pihak tanpa adanya koordinasi yang baik, hal itu menjadi sangat berat dan terasa tidak mudah.

Kemiskinan bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan, namun apabila tidak segera diatasi dengan serius, Indonesia akan menjadi negara yang bercitra kurang baik di mata dunia. Hal ini dikarenakan tingkat kriminalitas yang akan meningkat seiring semakin banyaknya masyarakat

miskin yang tidak mempunyai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya sendiri dan keluarganya.

Di samping itu pada bidang ekonomi Islam sendiri ada beberapa masalah yang menjadi penghambat sistem ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Permasalahan itu di antaranya: kecilnya *market share* industri keuangan syariah; rendahnya tingkat literasi keuangan syariah; kecilnya peranan industri perbankan dan keuangan syariah dalam pembangunan infrastruktur; perangkat peraturan, hukum, kebijakan dan fatwa baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum optimal merespon percepatan pertumbuhan ekonomi nasional; kualitas dan kompetensi sumber daya manusia ekonomi dan keuangan yang masih rendah; belum adanya *blue print* dan arsitektur pembangunan ekonomi syariah nasional yang integratif dan dijalankan oleh pemerintah; dan belum terbangunnya sinergi dan aliansi strategis antarpemegang kebijakan.

Dari berbagai permasalahan di atas ada beberapa pihak yang harus ikut serta dalam pengentasan masalah tersebut, seperti masyarakat, pemerintah, pihak lembaga keuangan syariah. Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat demi terciptanya bangsa Indonesia yang sejahtera. Salah satu cara adalah melalui pemberdayaan ekonomi umat yang juga menjalankan fungsi pendampingan. Sudah kita ketahui populasi umat Islam di Indonesia mencapai 207 juta jiwa atau sebanding dengan kurang lebih 82,8% dari seluruh populasi penduduk di Indonesia (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2010). Dengan angka sebesar yang disebutkan diatas, Indonesia menduduki sebagai negara yang memiliki populasi umat Islam terbesar di seluruh dunia.

Pihak yang mampu meningkatkan potensial usaha masyarakat adalah lembaga keuangan syariah. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) atau Koperasi Syariah. Operasionalnya sangat mendukung dan menunjang perekonomian rakyat khususnya mikro dan kecil melalui kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah (Supardie, 2013: 14).

Melalui *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), masyarakat miskin dan pedagang kecil akan terbebas dari jeratan sistem *riba* (bunga) dan beralih kepada sistem ekonomi Islam yang disebut dengan bagi hasil. BMT mendapat respon positif dari masyarakat karena BMT tergolong lebih lincah dan fleksibel, karena tidak *fully regulated*. Hal ini menyebabkan konsep BMT mampu dihadirkan di kawasan masyarakat kecil.

Dengan demikian, strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah dengan memadukan visi dan misi sosial dan bisnis. Dalam segi operasional, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pemberdayaan. Oleh karena itu, legalitas BMT pada saat ini yang paling cocok adalah berbadan hukum koperasi (Hermawan, 2002: 67).

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mendukung permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut mengingat bahwa layanan keuangan mikro syariah BMT relatif dapat lebih mudah diakses sebagian besar UMKM yang *unbankable*. Pembiayaan syariah memberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga konvensional yang menerapkan sistem bunga sehingga

dapat membebani UMKM, seperti perjanjian yang transparan yaitu anggota akan mengetahui biaya apa saja yang termasuk dalam perjanjian dan dapat bernegosiasi seputar margin keuntungan, selanjutnya pada pembiayaan syariah menggunakan sistem kekeluargaan.

Kehadiran BMT sangat membantu dalam mendapatkan pembiayaan dan juga dapat mengatasi masalah permodalan guna memperkuat usaha para anggota untuk mengembangkan usahanya. Jika BMT lebih maksimal dalam menyalurkan pembiayaannya, maka usaha serta hasil yang didapatkan oleh pedagang dan BMT yang dominan mengandalkan sistem bagi hasil ini diharapkan akan semakin meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha. Hal tersebut yang dapat dikatakan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membantu dalam ranah permodalan.

Untuk mengetahui strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih lanjut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) DI YOGYAKARTA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Yogyakarta?”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil*(BMT) di Yogyakarta”.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang *Baitul Maal Wat Tamwil* dikalangan umat Islam Yogyakarta. Selain itu memberikan kontribusi sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Dapat mendapatkan wawasan dan ilmu dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini.

##### **b. Bagi Lembaga Pendidikan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga pendidikan sebagai acuan untuk penelitian yang lain.

##### **c. Bagi Instansi**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat bagi *Baitul Maal Wat Tamwil* di Yogyakarta maupun di seluruh Indonesia untuk dapat eksis berperan ditengah dominasi sistem kapitalis dan sistem ekonomi pasar.